

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT <u>REPUBLIK INDONESIA</u>

# LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI (BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Persidangan	:	
Rapat	÷	Ke – 19 (Sembilanbelas)
Jenis Rapat		Rapat Dengar Pendapat
Dengan		Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Bukit
Deligan		Asam, Tbk
Sifat Rapat	N.	Terbuka
Hari, tanggal	;	Selasa, 6 Desember 2022
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I,
		secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	:	1. Proses penawaran pengolahan Blok Kohong Telakon
		2. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Sugeng Suparwoto
		(Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	•	A. Pemerintah
		<ul> <li>Dirjen Minerba KESDM RI</li> </ul>
		B. Stakeholder
		- Dirut PT Bukit Asam, Tbk
		C. 28 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII
		DPR RI terdiri dari:
		17 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
		11 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual
		23 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

### I. PENDAHULUAN

 Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 6 November 2022 dibuka pukul 14.15 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

- 2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Proses penawaran pengolahan Blok Kohong Telakon

b. Lain-lain

 Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dilanjutkan oleh H. Dony Maryadi Oekon, ST, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

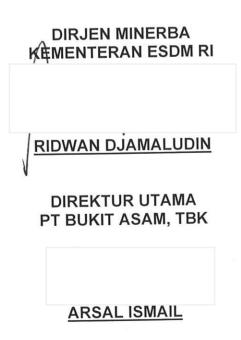
## II. KESIMPULAN RAPAT

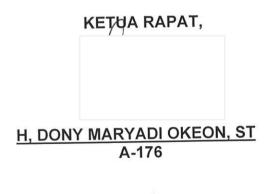
- 1. Dirjen Minerba KESDM RI akan menindaklanjuti keputusan Komisi VII DPR RI untuk menunda seluruh proses penawaran terhadap pengelolaan Blok Kohong Telakon milik eks PT Asmin Koalindo Tuhup hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.
- 2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba KESDM RI bersama Panja Illegal Mining untuk melakukan pengawasan secara intens terhadap WIUPK eks PT Asmin Koalindo Tuhup di Blok Kohong Telakon dan segera melibatkan aparat penegak hukum karena setelah PKP2B diterminasi seluruh kegiatan pertambangannya hingga saat ini adalah kegiatan pertambangan illegal.
- 3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba KESDM RI dan Dirut PT Bukit Asam Tbk untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan ke Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 13 Desember 2022.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.00 WIB

Jakarta, 6 Desember 2022





2